

# LAKIP 2022

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**DINAS KESEHATAN  
PROVINSI JAWA BARAT**

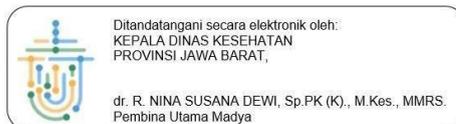
Jl Pasteur no. 25 Bandung  
Tahun 2023

## Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan di masa mendatang.

Bandung, 1 Maret 2023  
**KEPALA DINAS KESEHATAN**  
**PROVINSI JAWA BARAT**



## **DAFTAR ISI**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tugas Pokok Dan Fungsi
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

- 2.1. Perencanaan
  - 2.1.1. Perencanaan Stratejik
  - 2.1.2. Perencanaan Kinerja Tahun 2022
- 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- 2.3. Program Kegiatan dan Anggaran

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1. Hasil Pengukuran Kinerja
- 3.2. Evaluasi dan Analisis Pengukuran Capaian Kinerja
- 3.3. Akuntabilitas keuangan

### **BAB IV PENUTUP**

- 4.1. Simpulan Capaian Indikator Kinerja Utama
- 4.2. Simpulan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Stratejik

### **LAMPIRAN**

- IKU Dinas Kesehatan
- Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- Hasil Penilaian Tahun Sebelumnya
- Data Capaian Kinerja

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061.1/Kep.201-Org/2020 tentang Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat merupakan tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan program kebijakan dan pengembangan kesehatan masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*goodgovernance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Kesehatan.
2. Mendorong Dinas Kesehatan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kinerjanya.

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Kesehatan di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **1.2. Dasar Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

8. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1447);
17. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
18. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

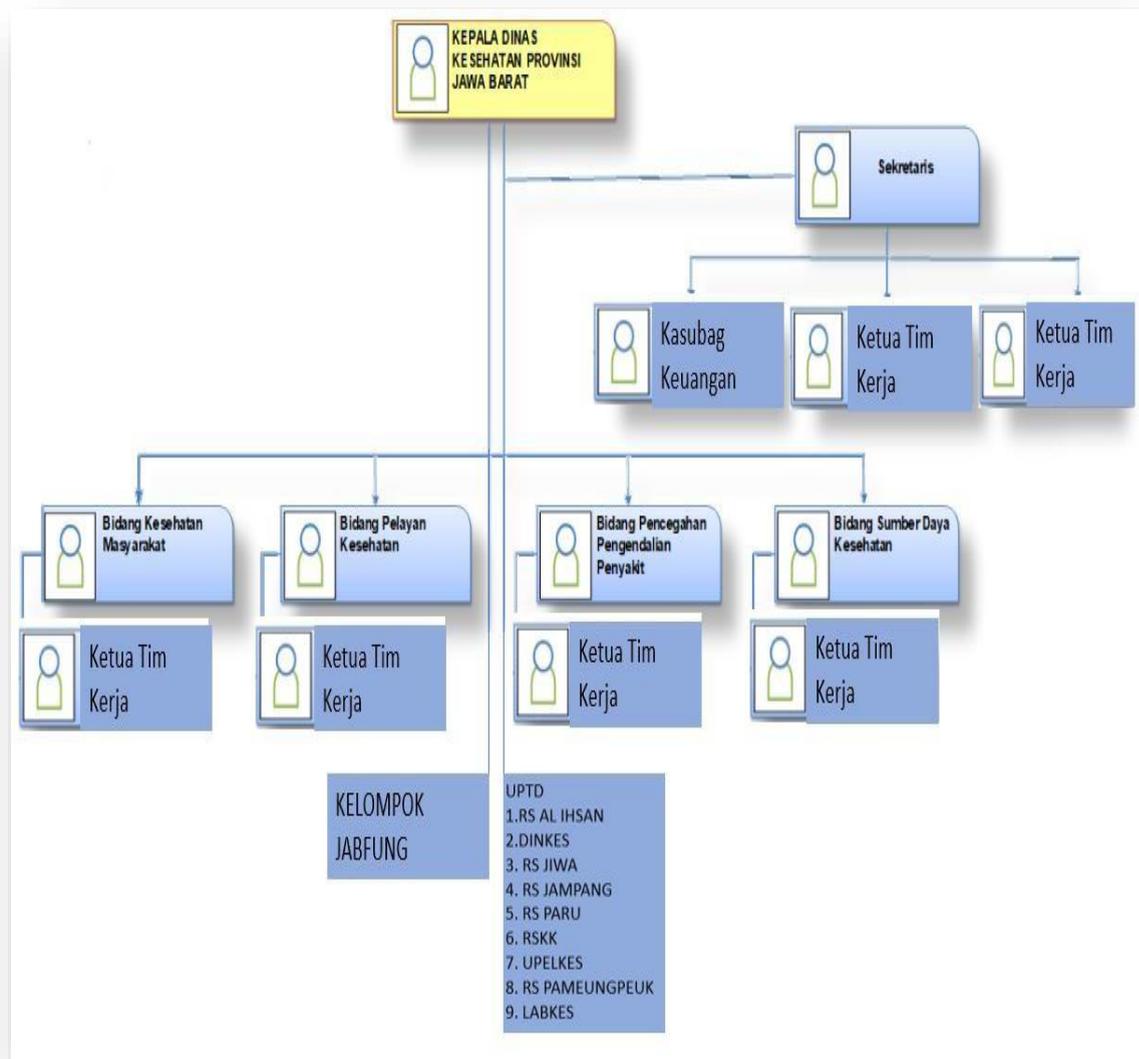
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023,
26. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Tugas Pokok Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
27. Keputusan Gubernur Nomor 050/354/PP tentang Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021;
28. Keputusan Gubernur Nomor 050/1668/PP tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 050/354/PP tentang Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021;

29. Keputusan Gubernur Nomor 13912/KS.01/PP tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 050/2307/PP tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023

### **1.3. Tugas Pokok Dan Fungsi**

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008, dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tugas poko, Fungsi, Rincian tugas unit dan tata kerja Dinas Kesehatan, di mana menjalankan sebagian tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat di Bidang Pembangunan Kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, di mana tipologi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat merupakan Tipe A yang mempunyai unit kerja terdiri dari satu sekretariat paling banyak 3 sub bagian, 4 Bidang dengan masing-masing bidang paling banyak 3 seksi, dengan struktur organisasi sebagai berikut :



Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

### 1.3.1 Tugas Pokok :

Tugas Pokok Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, meliputi kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 1.3.2 Fungsi :

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi :

1. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
2. Penyelenggaraan pengelolaan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dinas; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Rumah Sakit menjadi bagian UPTD Dinas kesehatan Provinsi Jawa Barat, yang sebelumnya berdiri sebagai Perangkat Daerah sendiri. Untuk itu sejak tahun 2017, Rumah Sakit Al Ihsan, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru, Rumah Sakit Pameungpeuk dan Rumah Sakit Jampangkulon menjadi UPTD Dinas Kesehatan selain 2 (dua) UPTD dinas kesehatan sebelumnya yaitu UPTD Unit Pelatihan Kesehatan (UPELKES) dan UPTD Laboratorium Kesehatan (LABKES).

Sumber daya manusia di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

No.	BAGIAN BIDANG	JUMLAH (Orang)	KETERANGAN
1.	KEPALA DINAS	1	Dokter, S2
2.	SEKRETARIS	1	Manajemen ,S3
3.	<b>SUBBAGIAN</b>		
	a. Kepala Subbagian Perencanaan dan Program	1	Kesehatan Masyarakat, S2
	b. Kepala Subbagian Keuangan	1	S1
	c. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	1	S2
	d. Staf	61	- S2 = 3 orang - S1/D4 = 27 orang - D3 = 8 orang - SLTA = 22 orang - SLTP = 0 orang - SD = 1 orang
4.	<b>BIDANG</b>	4	
a.	Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan	1	Dokter, S2
	1. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	1	Dokter, S2
	2. Kepala Seksi Kesehatan Rujukan	1	S1 Keperawatan
	3. Kepala Seksi Mutu	1	S1 Kesmas

No.	BAGIAN BIDANG	JUMLAH (Orang)	KETERANGAN
	4. Staf	25	- S2 = 5 orang - D3 = 5 orang - S1 = 11 orang - SLTA = 4 orang
b.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	1	S2 Dokter Gigi
	1. Kepala Seksi Kesehatan Gizi Dan Kesehatan Keluarga	1	S1 Kesehatan
	2. Kepala Seksi Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat	1	S2 Teknik
	3. Kepala Seksi Kesja dan Olah Raga	1	S2 Kesmas
	4. Staf	30	- S2 = 6 orang - D3 = 2 orang - S1/D4 = 16 orang - SLTA = 6 orang
c.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	1	Dokter Gigi, S2
	1. Kepala Seksi Farmasi, Kosalkes dan Mamin	1	Apoteker, S2
	2. Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	1	Dokter, S2
	3. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	S2 Kesehatan
	4. Staf	32	- S2 = 5 orang - D3 = 4 orang - S1/D4 = 15 orang - SLTA = 8 orang
d.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1	Dokter, S2
	1. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi	-	-
	2. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1	S2 Non Kesehatan
	3. Kepala Seksi Pengamatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	1	Dokter, S2
	4. Staf	31	- S2 = 6 orang - SLTA = 5 orang - S1/D4 = 17 orang - D3 = 3 orang

#### 1.4 Perbandingan anggaran 2021 dan 2022

NO	Tahun	Anggaran
1	2021	2,410,513,925,228
2	2022	1,997,685,172,519

Tahun Anggaran 2022 anggaran Dinas Kesehatan menurun sebesar Rp.412,831,752,709,- dari Tahun Anggaran 2021

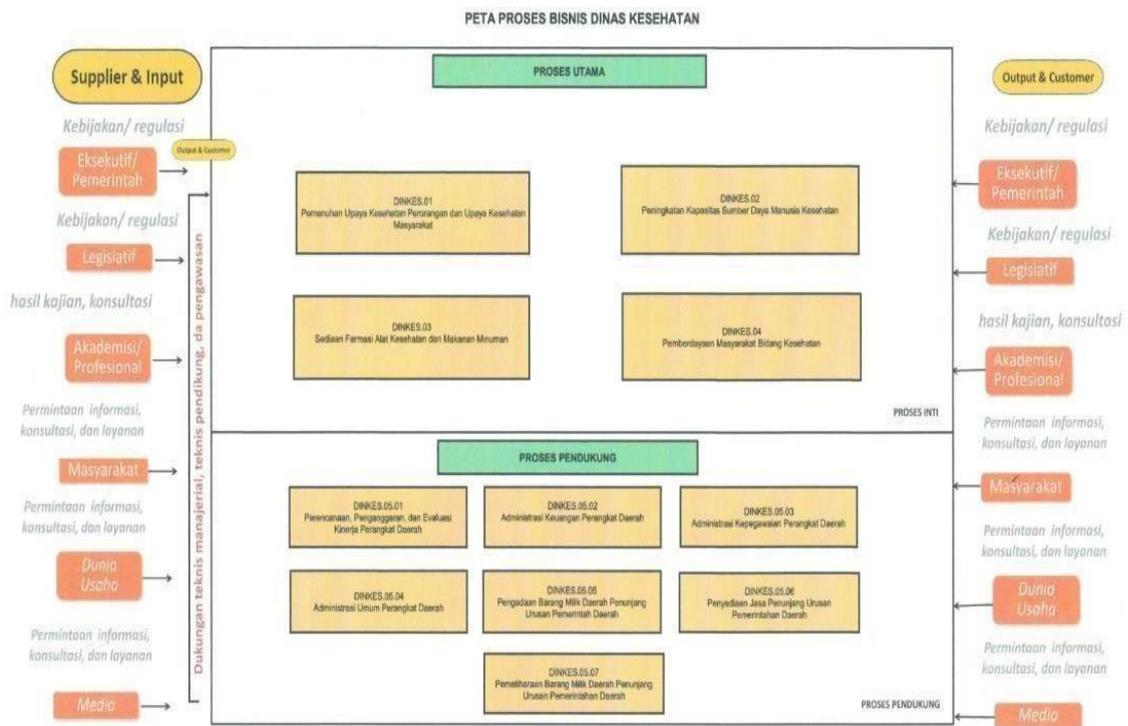
## 1.5 Cascading Dinas Kesehatan

# Cascading Dinas Kesehatan

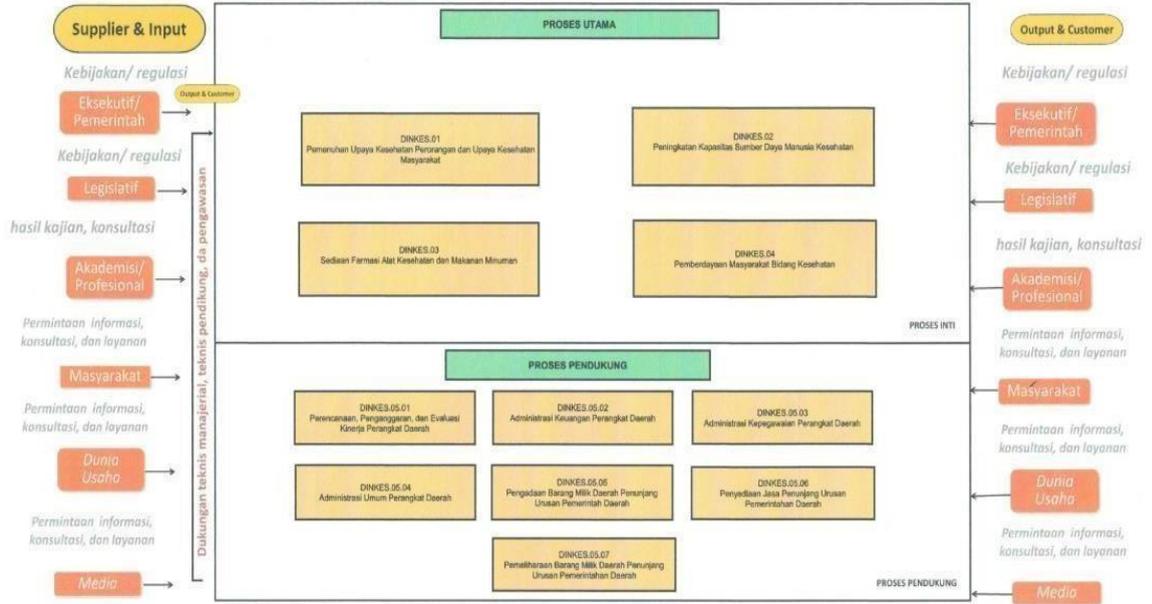


Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Pendayagunaan dan Pemeliharaan Kesehatan	Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Kelahiran dan Alat Kesehatan
<b>Indikator</b> Persentase Perilaku yang mendukung jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC)	<b>Indikator</b> Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan MMB, Pemelihara Daerah Terlewat Tembak Kesehatan sesuai standar	<b>Indikator</b> Persentase Perimbangan Jenis-Sarana Podang Besar Farmasi (PFB) Cabang, Sarana Cabang Penyulur Alat Kesehatan (PAC) dan
<b>Pengampu</b> Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	<b>Pengampu</b> Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	<b>Pengampu</b> Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
<b>Sasaran Kegiatan</b> Terpenuhi kebutuhan pembiayaan jaminan kesehatan	<b>Sasaran Kegiatan</b> Meningkatnya kompetensi tenaga kesehatan	<b>Sasaran Kegiatan</b> Meningkatnya kualitas perencanaan kebu
<b>Indikator</b> Persentase alat yang tercatat	<b>Indikator</b> Persentase Tenaga Kesehatan terlatih yang aktif bekerja di Fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi	<b>Indikator</b> Persentase dokumen perencanaan tenaga kesehatan yang sesuai ketentuan
<b>Nama Kegiatan</b> Perencanaan jaminan kesehatan untuk UHF Kabupaten, UMS, dan UMS Kabupaten Tingkat Daerah Provinsi	<b>Nama Kegiatan</b> Pengembangan Mula dan Pendidikan Kompetensi Teknik SOMK tingkat daerah Provinsi	<b>Nama Kegiatan</b> Perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UMS dan UKP Daerah
<b>Pengampu</b> Sekretaris	<b>Pengampu</b> Kepala Bidang SDM	<b>Pengampu</b> Kepala Bidang SDM
<b>Sasaran Sub Kegiatan</b> Terwujudnya daftar aset	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b> Terlaksananya Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit LPTD Provinsi terkait pengalihan SOMK	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b> Terlaksananya Pemahaman Rekomendasi Kebijakan dan Kabupaten/Kota dan LPTD Provinsi untuk mendapatkan Program Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
<b>Indikator</b> Jumlah Aset yang tercatat	<b>Indikator</b> Jumlah dokumen perencanaan bentuk keuangan jaminan kesehatan kabupaten/kota yang diverifikasi	<b>Indikator</b> Persentase pemahaman rekomendasi kebijakan yang dianggotai
<b>Nama Sub Kegiatan</b> Kopas Sub Bidang Keuangan dan Aset	<b>Nama Sub Kegiatan</b> Pengalihan Jaminan Kesehatan Masyarakat	<b>Nama Sub Kegiatan</b> Distribusi dan Pemetaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
	<b>Pengampu</b> Kepala Area PA	<b>Pengampu</b> Kepala Area SOMK
	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b> Terlaksananya kab/kota dalam penyediaan anggaran jaminan kesehatan sesuai regulasi	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b> Terlaksananya pemenuhan rekomendasi kebijakan yang dianggotai
	<b>Indikator</b> Jumlah kab/kota yang dilulus dalam penyediaan anggaran jaminan kesehatan sesuai regulasi	<b>Indikator</b> Persentase tenaga kesehatan non ASN Provinsi yang mendapatkan honorarium
	<b>Nama Sub Kegiatan</b>	<b>Nama Sub Kegiatan</b>

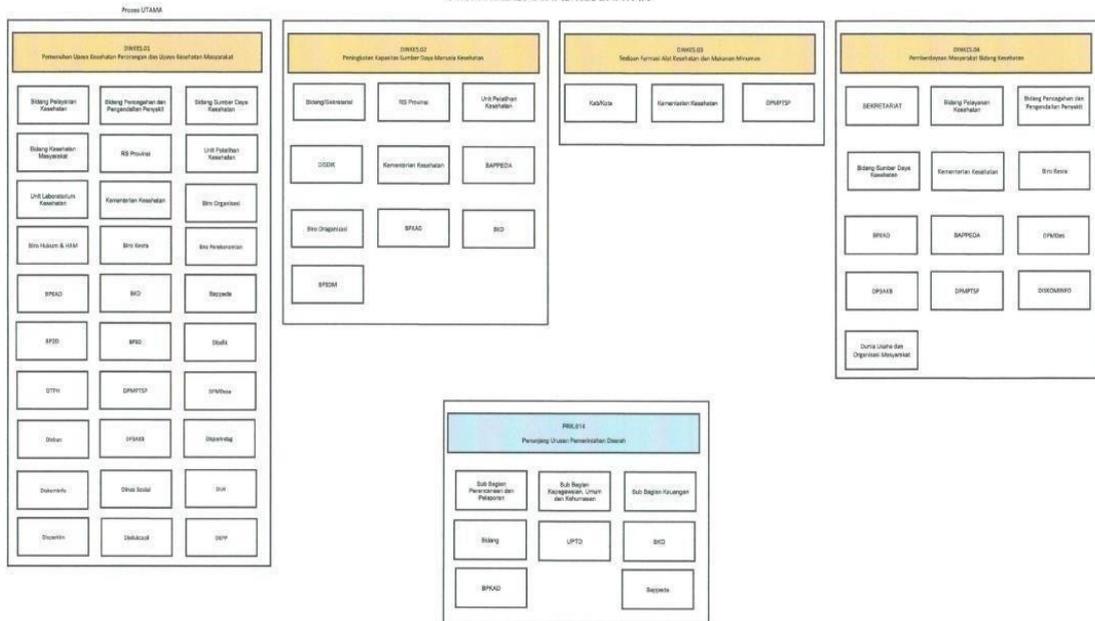
## 1.6 Proses Bisnis Dinas Kesehatan



PETA PROSES BISNIS DINAS KESEHATAN



PETA RELASI DINAS KESEHATAN



### 1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Sakip 2022

No	Hasil Evaluasi SAKIP 2022	Tindak Lanjut
1.	Menyusun rencana aksi kinerja yang memuat target kinerja secara periodik baik target sub kegiatan, kegiatan, program, maupun sasaran strategisnya	Telah disusun rencana aksi kinerja sesuai rekomendasi
2.	Menyusun pelaporan kinerja yang menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja ditingkat nasional (Benchmark kinerja).	Dalam penyusunan LAKIP 2022, capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan telah disandingkan capaian dengan capaian nasional
3.	Informasi dalam laporan kinerja agar menjadi perhatian utama pimpinan dan menjadi kepedulian seluruh pegawai.	Telah dibuat nota dinas/surat edaran pemberitahuan kepada seluruh bidang dan UPTD bahwa pelaporan kinerja harus menjadi komitmen bersama dan dilaporkan secara periodic serta telah dilakukan uji petik kepada pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan terkait substansi yang dimuat di dalam LKIP Dinas Kesehatan.
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk dilaksanakan pada seluruh unit kerja yang ada pada Dinas Kesehatan dan melakukan evaluasi yang mendalam atas kinerja yang dicapai.	Telah disampaikan nota dinas kepada Bidang dan UPTD untuk melakukan evaluasi secara berjenjang terhadap capaian kinerja dan telah dibuatkan analisis terhadap laporan evaluasi bidang dan uptd

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Perencanaan**

##### **2.1.1. Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023**

**Visi Pembangunan** Jawa Barat Tahun 2005 - 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 adalah **“Dengan Iman dan Taqwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia”**. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan tantangan dan peluang serta budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 adalah **“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”**.

Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan misi Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

- Membentuk manusia pancasila yang bertaqwa melalui peningkatan peran mesjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban;
- Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif;
- Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah;
- Meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan;
- Mewujudkan tata kelola pemerintah yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kab/kota.

Dinas Kesehatan sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkepentingan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena penting dan aktual yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 tahun sebelumnya khususnya aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Maka Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan

Kesehatan adalah Misi 2 yaitu melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif, dengan tujuan meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan sasarannya adalah meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan.

### **2.1.1.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi Dinas Kesehatan**

#### **Tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat**

Perumusan Tujuan Dinas kesehatan diperlukan sebagai penjabaran Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Adapun Tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat di dalam Renstra Tahun 2018-2023 ialah “Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan ditopang oleh Sistem Kesehatan Daerah yang Tangguh”

#### **Sasaran dan Indikator Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat**

Untuk mewujudkan Tujuan Jangka Menengah Dinas Kesehatan, telah ditetapkan sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang berdaya saing, dengan indikator:
  - Persentase pelaksanaan SPM Kesehatan di kabupaten/kota
  - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan UPTD Provinsi
  - Jumlah Rumah Sakit Provinsi yang Terakreditasi Paripurna
2. Menurunnya kasus stunting di Jawa Barat melalui upaya konvergensi lintas sector, dengan indicator prevalensi stunting.

#### **Strategi, Kebijakan, dan Program**

Dalam rangka mencapai Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan strategi dan kebijakan yang menjadi panduan dalam melakukan program/kegiatan dalam periode 5 tahun.

## 1. Strategi

### 1) Strategi dalam peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang berdaya saing;

- a. Peningkatan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat melalui peningkatan mutu layanan dan pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan kedaruratan kesehatan masyarakat;
- b. Peningkatan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan kesehatan untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
- c. Peningkatan jumlah, mutu, dan persebaran sumber daya manusia kesehatan;
- d. Peningkatan penatalaksanaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan;
- e. Penguatan pemberdayaan masyarakat di bidang Kesehatan;
- f. Penguatan pengelolaan manajemen data dan informasi serta regulasi Kesehatan.

### 2) Strategi dalam menurunkan kasus stunting di Jawa Barat melalui upaya konvergensi lintas sector, yaitu:

- a. Penguatan pelayanan gizi dengan pendekatan 1000 HPK dan *continuum of care*;
- b. Peningkatan intervensi langsung kepada balita stunting;
- c. Penguatan kerjasama/kolaborasi semua sumber daya meliputi pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media dalam konvergensi kegiatan;
- d. Peningkatan penyuluhan perubahan perilaku pada keluarga melalui berbagai media promosi kesehatan;
- e. Penguatan system surveilans gizi yang terintegrasi.

## 2. Arah Kebijakan:

- 1) Arah kebijakan dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang berdaya saing, yaitu:
  - a. Meningkatkan pelayanan kesehatan dengan memberikan pelayanan sesuai SPM

- b. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan UPTD
  - c. Meningkatkan kualitas dan perluasan layanan RS Provinsi
  - d. Memperkuat pembinaan dan pengelolaan BLUD pada UPTD Dinas Kesehatan
  - e. Memperkuat system kesehatan daerah provinsi
  - f. Memperkuat pelayanan kesehatan di wilayah pengembangan, pusat pusat kegiatan, dan wilayah perbatasan
- 2) Arah kebijakan dalam menurunkan kasus stunting di Jawa Barat melalui upaya konvergensi lintas sektor
- a. Memperluas intervensi spesifik dan penguatan intervensi sensitive yang terintegrasi
  - b. Memperkuat intervensi konvergensi lintas sektor

### **3. Program :**

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- d. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman
- e. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

#### **2.1.2 Perencanaan Kinerja Tahun 2022**

Perencanaan Kinerja Tahun 2022 disusun berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023.

#### **Tujuan Dinas Kesehatan Povinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 :**

“Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan ditopang oleh Sistem Kesehatan Daerah yang Tangguh”

#### **Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 :**

1. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Berdaya Saing
2. Menurunnya Kasus Stunting di Jawa Barat melalui Upaya Konvergensi Lintas Sektor.

**Indikator :**

1. Persentase Pelayanan SPM di Kabupaten/Kota
2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan UPTD
3. Jumlah RS yang terakreditasi Paripurna
4. Prevalensi Stunting

**2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022****Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang berdaya saing	Prosentase pelayanan SPM di Kab/Kota	67,63%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan UPTD	81,26 -81,75
		Persentase RS provinsi yang terakreditasi Paripurna	50%
2	Menurunnya kasus stunting di Jawa Barat melalui upaya konvergensi lintas sector	Prevalensi stunting	23,2%

## 2.3 Program Kegiatan dan Anggaran

Program kegiatan yang mendukung sasaran strategis sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>547,781,346,496</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1,881,915,534
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,631,202,534
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	154,512,000
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	23,706,000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	69,553,000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,942,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		530,566,806,382
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	530,466,806,382
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	23,348,000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	57,152,000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD	19,500,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		2,612,905,496
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1,657,418,496
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	463,750,000

		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	491,737,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		2,196,706,140
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	672,425,140
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	255,167,000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,269,114,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		8,006,727,169
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,984,917,625
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,000,000,000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,021,809,544
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2,516,285,775
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	484,059,000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	840,000,000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,192,226,775
2	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		<b>450,342,134,061</b>
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		51,288,907,836

		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	900,064,836
		Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	31,888,843,000
		Distribusi Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) ke Kabupaten/Kota	18,500,000,000
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		397,187,289,325
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	608,910,090
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	18,066,071,055
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	611,230,300
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	103,854,857
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	689,386,120
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	209,114,920
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	394,302,080
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	244,590,000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2,632,833,493
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	171,583,000

		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	200,701,840
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	353,361,219,960
		Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	4,964,743,840
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	14,457,930,170
		Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	196,520,000
		Pengelolaan Penelitian Kesehatan	274,297,600
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		312,125,780
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	312,125,780
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		1,553,811,120
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	196,285,910
		Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	431,373,450
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	926,151,760
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>		<b>79,648,882,371</b>
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		78,770,867,645
		Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	78,770,867,645
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		878,014,726

		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	878,014,726
4	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>		<b>175,115,164</b>
	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)		106,918,019
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	106,918,019
	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)		68,197,145
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	68,197,145
5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>		<b>3,153,655,032</b>
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		142,082,852
		Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	142,082,852
	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi		3,011,572,180
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	3,011,572,180
	<b>UPTD LABORATORIUM KESEHATAN</b>		<b>68,885,730,000</b>
6	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>17,358,402,040</b>
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4,680,376,480
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4,473,976,480

		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	206,400,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		6,426,515,560
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40,000,000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,124,370,560
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	1,311,711,000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,950,434,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2,800,540,000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2,800,540,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3,450,970,000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	955,970,000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2,495,000,000
<b>10</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		<b>51,527,327,960</b>
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		50,898,077,960
		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8,272,483,623
		Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	25,896,216,337
		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	16,729,378,000
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		629,250,000

		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	629,250,000
	<b>UPTD PELATIHAN KESEHATAN</b>		<b>3,984,000,000</b>
11	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>3,421,630,765</b>
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		15,000,000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15,000,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		467,058,669
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42,895,377
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	266,220,273
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50,077,019
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	66,750,000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41,116,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		262,134,400
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	262,134,400
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2,203,175,576
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500,350,000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,702,825,576
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		474,262,120
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132,515,000

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100,830,000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	240,917,120
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		<b>44,000,000</b>
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		44,000,000
		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	44,000,000
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>		<b>518,369,235</b>
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		518,369,235
		Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	518,369,235
	<b>UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMEUNGPEUK GARUT</b>		<b>79,232,920,986</b>
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>47,332,920,986</b>
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,000,000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,000,000
	Peningkatan Pelayanan BLUD		47,232,920,986
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	47,232,920,986
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		<b>13,100,000,000</b>
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		5,500,000,000
		Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	5,500,000,000
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		7,600,000,000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	600,000,000

		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	7,000,000,000
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>			<b>18,800,000,000</b>
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		18,800,000,000
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	18,800,000,000
<b>UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KESEHATAN KERJA PROVINSI JAWA BARAT</b>			<b>40,276,000,000</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>9,257,788,000</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,000,000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,000,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		88,596,000
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	88,596,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		81,500,000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	81,500,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1,592,695,000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	886,000,000
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	117,225,000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	130,000,000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	459,470,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4,894,997,000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	894,997,000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4,000,000,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2,500,000,000

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500,000,000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,000,000,000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,000,000,000
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		<b>15,917,712,000</b>
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		4,518,000,000
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	4,000,000,000
		Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	518,000,000
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		11,154,712,000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	900,000,000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	790,000,000
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100,000,000
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	9,364,712,000
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		245,000,000
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	245,000,000
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>		<b>15,100,500,000</b>
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		15,000,000,000
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	15,000,000,000

	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		100,500,000
		Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	100,500,000
	<b>UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI</b>		<b>97,543,900,000</b>
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>48,000,000,000</b>
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		500,000,000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7,500,000,000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2,013,279,000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5,486,721,000
	Peningkatan Pelayanan BLUD		40,000,000,000
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	40,000,000,000
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		<b>18,043,900,000</b>
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		10,500,000,000
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	5,500,000,000
		Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	500,000,000
		Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	4,500,000,000
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		7,543,900,000
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	7,543,900,000
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>		<b>31,500,000,000</b>
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		31,400,000,000
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	31,400,000,000

	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		100,000,000
		Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	100,000,000
	<b>UPTD RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI JAWA BARAT</b>		<b>79,641,249,400</b>
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>43,477,552,971</b>
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		500,000,000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	100,000,000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		10,505,000,000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10,505,000,000
	Peningkatan Pelayanan BLUD		32,472,552,971
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	32,472,552,971
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		<b>32,467,800,000</b>
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		28,767,800,000
		Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	28,767,800,000
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		3,500,000,000
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	3,500,000,000
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		200,000,000
		Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	200,000,000
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>		<b>3,695,896,429</b>
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		3,395,896,429
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	3,395,896,429

	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		300,000,000
		Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	156,000,000
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	144,000,000
	<b>UPTD RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT</b>		<b>49,645,699,997</b>
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>23,679,934,988</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		200,000,000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	200,000,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100,000,000
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100,000,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		150,150,000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150,150,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1,231,880,800
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,691,800
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	130,029,000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	800,160,000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5,049,205,500
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,199,205,500
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,850,000,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3,929,609,126

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300,000,000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2,300,000,000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,329,609,126
	Peningkatan Pelayanan BLUD		13,019,089,562
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	13,019,089,562
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		<b>9,595,700,009</b>
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		8,800,000,009
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	8,500,000,009
		Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	300,000,000
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		595,700,000
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	50,000,000
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	500,000,000
		Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	45,700,000
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		200,000,000
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	200,000,000
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>		<b>16,320,065,000</b>
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		16,320,065,000

		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	16,320,065,000
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>		<b>50,000,000</b>
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		50,000,000
		Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	50,000,000
	<b>RSUD AL IHSAN</b>		<b>460,818,787,850</b>
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>356,110,000,000</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		240,273,000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	240,273,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		2,869,727,000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,287,000,000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29,220,000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	200,000,000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	353,507,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3,000,000,000
		Pengadaan Mebel	3,000,000,000
	Peningkatan Pelayanan BLUD		350,000,000,000
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	350,000,000,000
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		<b>86,698,431,502</b>
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		76,698,431,502
		Pengembangan Rumah Sakit	8,748,241,939

		Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	64,726,631,328
		Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	3,223,558,235
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		10,000,000,000
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	10,000,000,000
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>		<b>18,010,356,348</b>
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		18,010,356,348
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	18,010,356,348

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategik

#### 3.1.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategik Tahun 2022

Capaian kinerja sasaran strategik dinilai dengan 4 kategori penilaian sasaran yaitu baik sekali, baik, cukup, dan kurang, dengan kriteria sebagai berikut:

SKALA NILAI	KATEGORI PENILAIAN
≥ 100 %	Sangat Baik
> 80 - < 100 %	Baik
> 55 - < 80 %	Cukup
< 55 %	Kurang

Capaian indikator kinerja Dinas kesehatan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

#### SASARAN 1

#### Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang berdaya saing

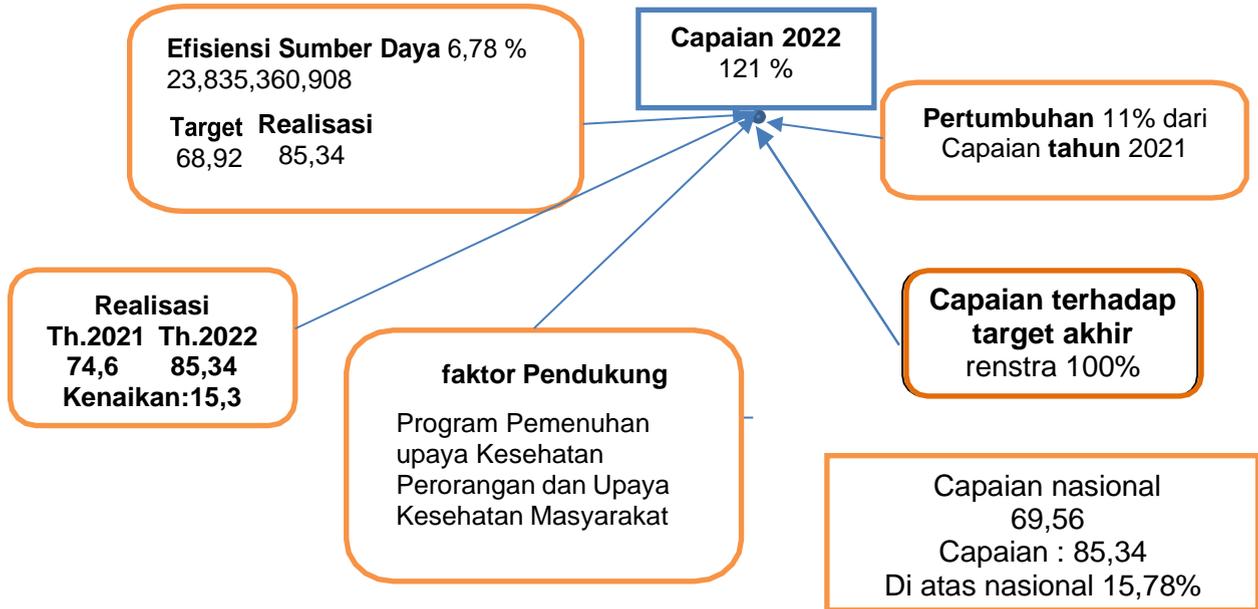
Sasaran ini diukur oleh Indikator Kinerja:

1. Indikator Persentase Pelayanan SPM di Kab/Kota.

Tabel 3.1  
Capaian Indikator Kinerja

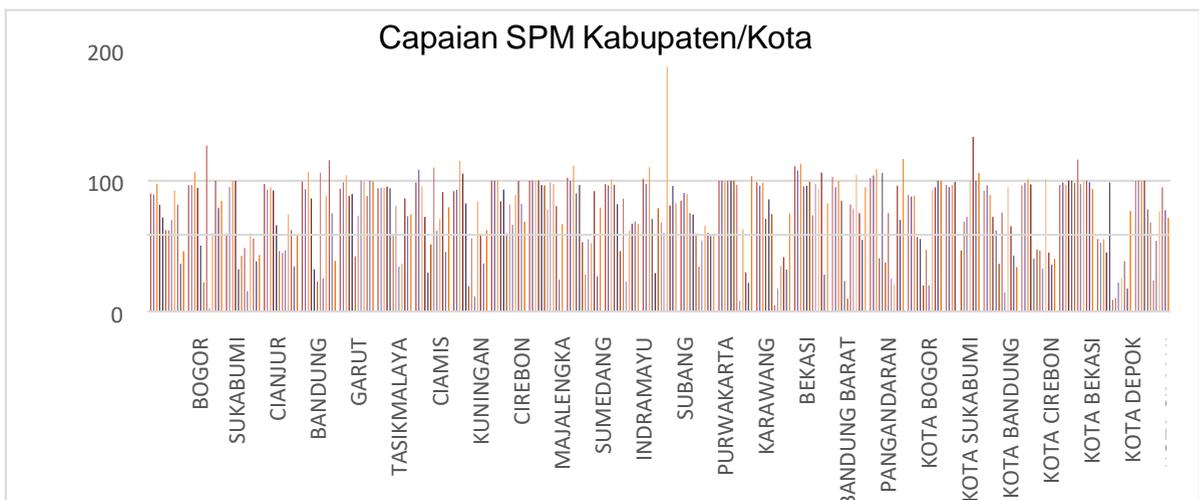
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET	CAPAIAN %	KATEGORI
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang berdaya saing	Prosentase pelayanan SPM Kesehatan di Kab/Kota	85,34 %	68,92 %	121 %	Sangat baik

Persentase pelayanan SPM Kesehatan di kabupaten/kota



Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara. SPM bidang Kesehatan didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Capaian indikator persentase pelayanan SPM di kab/kota sebesar 121 % dengan realisasi di tahun 2022 sebesar 85,34 % dari target 68,92 %

Tabel 3.2



Jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu, dengan capaian 110% terdapat kenaikan capaian sebesar 11 % dan dari sisi realisasi tahun 2021 realisasi 74,6 ada kenaikan sebesar 15,3 % . Dalam perspective target akhir renstra capaian indicator ini pada tahun 2023 sebesar 100%. Dengan demikian, capaian pelayanan SPM di kabupaten/kota di Jawa Barat telah melebihi target yang ditetapkan di akhir tahun 2022.

Jika dibandingkan dengan capaian nasional, capaian pelayanan SPM di Provinsi Jawa Barat berada di atas rata-rata capaian nasional yang pencapaiannya sebesar 69,56% pada tahun 2022.

Upaya Dinas Kesehatan untuk mempertahankan capaian ini, salah satunya dengan memberikan penghargaan kepada kabupaten/kota yang berkinerja terbaik dalam penerapan SPM dan melakukan pembinaan rutin kepada kabupaten/kota agar penerapan SPM dapat terus ditingkatkan.

Salah satu penyebab meningkatnya akses dan kualitas pelayan Kesehatan yang berdaya saing ini dipengaruhi oleh mulai melandainya kasus Covid-19 di Jawa Barat sehingga kabupaten/kota mulai kembali focus pada pemberian pelayanan kesehatan lainnya dan masyarakat mulai kembali memanfaatkan fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan kesehatannya.

Critical success factor yang dapat meningkatkan sasaran ini diantaranya,

- a. Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,
- b. Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat,
- c. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di bidang Kesehatan,
- d. Meningkatnya kualitas sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman di Jawa Barat,

Program Dinas Kesehatan Provinsi dalam mendukung penerapan pelayanan SPM di kabupaten/kota yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Program Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dan Program Pemberdayaan Masyarakat. Selain itu, koordinasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi rutin terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat kepada Kabupaten/Kota.

Dengan adanya pencapaian indikator ini terjadi efisiensi anggaran sebesar

Rp. 23,835,360,908- atau 6,78 % jika dilihat dari pagu anggaran untuk indikator ini di tahun 2022 sebesar Rp. 887,297,982,765 dengan realisasi sebesar Rp. 863,462,621,857,-

2. Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan UPTD

Tabel 3.3

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET	CAPAIAN %	KATEGORI
2	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang berdaya saing	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap layanan UPTD	88 %	81,26-81,75 %	106,80	Sangat baik



Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dinilai dari rata-rata hasil survey yang dilakukan oleh 6 (enam) UPTD di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Capaian Indeks

Kepuasan Masyarakat terhadap layanan UPTD adalah 106,8% dengan realisasi di tahun 2022 sebesar 88 % dari target 81,26-81,75.

Tabel 3.4  
Capaian IKM UPTD Dinas Kesehatan

No	UPTD	Satuan	Target	Realisasi
1	IKM terhadap pelayanan pada UPTD RSUD AL IHSAN	Poin	80.00	97,08
2	IKM terhadap pelayanan pada UPTD RSUD JAMPANGKULON	Poin	77.00	83.92
3	IKM terhadap pelayanan pada UPTD RSUD PAMEUNGPEUK	Poin	83.54	83,21
4	IKM terhadap pelayanan pada UPTD RS PARU	Poin	76.00	90,13
5	IKM terhadap pelayanan pada UPTD RS JIWA	Poin	75.00	90,85
6	IKM terhadap pelayanan pada UPTD RS KESEHATAN KERJA	Poin	80.00	83,5
7	IKM terhadap pelayanan pada UPTD UPELKES	Poin	75.00	88,15
8	IKM terhadap pelayanan pada UPTD LABKES	Poin	80.33	92,40

Perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya, ada kenaikan capaian sebesar 6,51%

Realisasi pada tahun 2022 sebesar 88 poin sedangkan tahun sebelumnya 81,99 ada kenaikan realisasi 6,1 poin, sedangkan capaian target akhir Renstra di tahun 2023 yaitu 100%. Dinas Kesehatan sudah mencapai target akhir renstra tersebut. Indikator ini tidak dapat dilakukan perbandingan dengan nasional maupun daerah lainnya karena indikator ini tidak digunakan sebagai indikator kinerja di tingkat nasional maupun daerah lain.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat adalah melakukan pembinaan dan pendampingan dalam rangka mendorong UPTD untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya baik melalui dukungan anggaran bagi masing-masing UPTD maupun dukungan teknis lainnya, mendorong setiap UPTD untuk mendapatkan akreditasi paripurna, serta optimalisasi sumberdaya Kesehatan yang dimiliki.

Faktor yang mempengaruhi tercapainya indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya upaya masing-masing UPTD Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya, meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan, serta meningkatkan

kapasitas sumberdaya manusia yang berkualitas, critical success factor yang dapat meningkatkan sasaran ini antara lain :

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Kesehatan
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggara Pelayanan
3. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat.

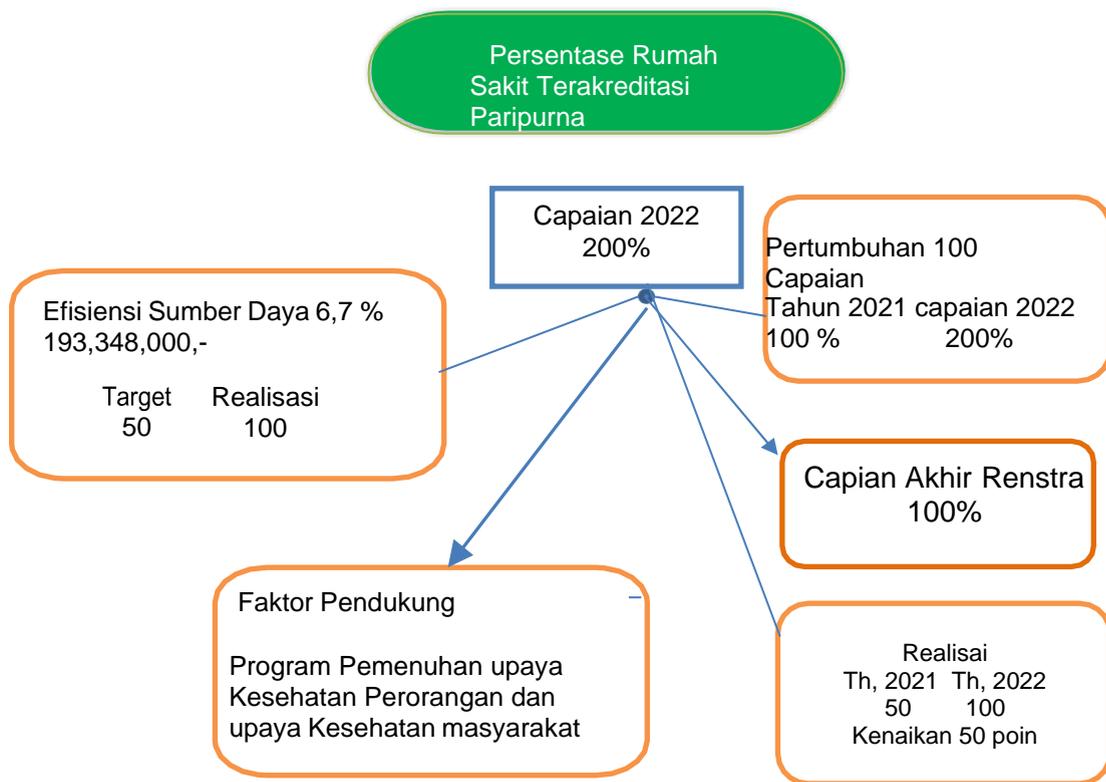
Program yang mendukung indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan UPTD antara lain Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dimana dalam program ini terdapat kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas layanan antara lain peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan UPTD dan kegiatan yang ditujukan bagi masyarakat miskin di luar BPJS yaitu kegiatan jaminan pembiayaan Kesehatan masyarakat di rumah sakit milik provinsi.

Dari Hasil pencapaian di atas maka dapat terlihat upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan UPTDnya dapat dikatakan sudah berjalan efektif sehingga persentase capaian indikator dapat mencapai 106,8% dengan efisiensi sumber daya sebesar Rp.109,528,344,076,- atau 9,8 %

### 3. Indikator : Persentase RS provinsi yang terakreditasi Paripurna

Tabel 3.5

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET	CAPAIAN %	KATEGORI
3	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang berdaya saing	Persentase RS Provinsi yang terakreditasi Paripurna	75	50%	150	Sangat baik



Indikator RS Provinsi yang terakreditasi Paripurna merupakan indikator untuk menilai kinerja rumah sakit provinsi dalam hal manajemen rumah sakit agar rumah sakit dapat memenuhi standar pelayanan rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit secara berkesinambungan. Status akreditasi berlaku selama 4 tahun yang penilaiannya dilakukan oleh Tim KARS Nasional sebagai Lembaga independen yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Dari hasil penilaian KARS terhadap rumah sakit provinsi, target 50% rumah sakit provinsi terakreditasi paripurna dapat tercapai 100% Rumah Sakit pada tahun 2022 sehingga capaian indikator RS Provinsi terakreditasi paripurna mencapai 200%.

Indikator ini termasuk indikator baru dalam perubahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya ada kenaikan 50 % dari tahun 2021, dengan capaian 100% sementara capaian target akhir Renstra adalah 100%, untuk realisasi ada kenaikan 50 poin dari tahun sebelumnya .

## Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit



Indikator ini tidak dapat dilakukan perbandingan dengan nasional maupun daerah lainnya karena indikator ini tidak digunakan sebagai indikator kinerja di tingkat nasional maupun daerah lain.

Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan untuk mendorong seluruh RS Provinsi dapat terakreditasi paripurna dengan memberikan pembinaan, pendampingan, dan dukungan anggaran untuk memperkuat komponen penilaian akreditasi.

Critical success factor yang dapat meningkatkan sasaran ini keberhasilan di antaranya :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Provinsi sesuai standar
2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
3. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan

Program yang mendukung tercapainya indikator ini adalah program Pemenuhan upaya Kesehatan Perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat. program ini mempunyai kegiatan yang rutin dalam mendukung pelaksanaan akreditasi di Rumah Sakit. Keberhasilan dalam mencapai Indikator RS Provinsi terakreditasi paripurna ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adanya komitmen yang kuat dari seluruh UPTD untuk meningkatkan kualitas pelayanan baik pelayanan Kesehatan rujukan yang diberikan RS kepada masyarakat maupun

pelayanan laboratorium dan pelayanan pelatihan bagi tenaga Kesehatan yang lebih berkualitas.

Dari Hasil pencapaian di atas maka dapat terlihat upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan prosentase RS Provinsi yang terakreditasi paripurna dapat dikatakan sudah berjalan efektif sehingga persentase capaian indikator dapat mencapai 200% dengan efisiensi sumber daya sebesar Rp. 6,652,000,- atau 3.40%.

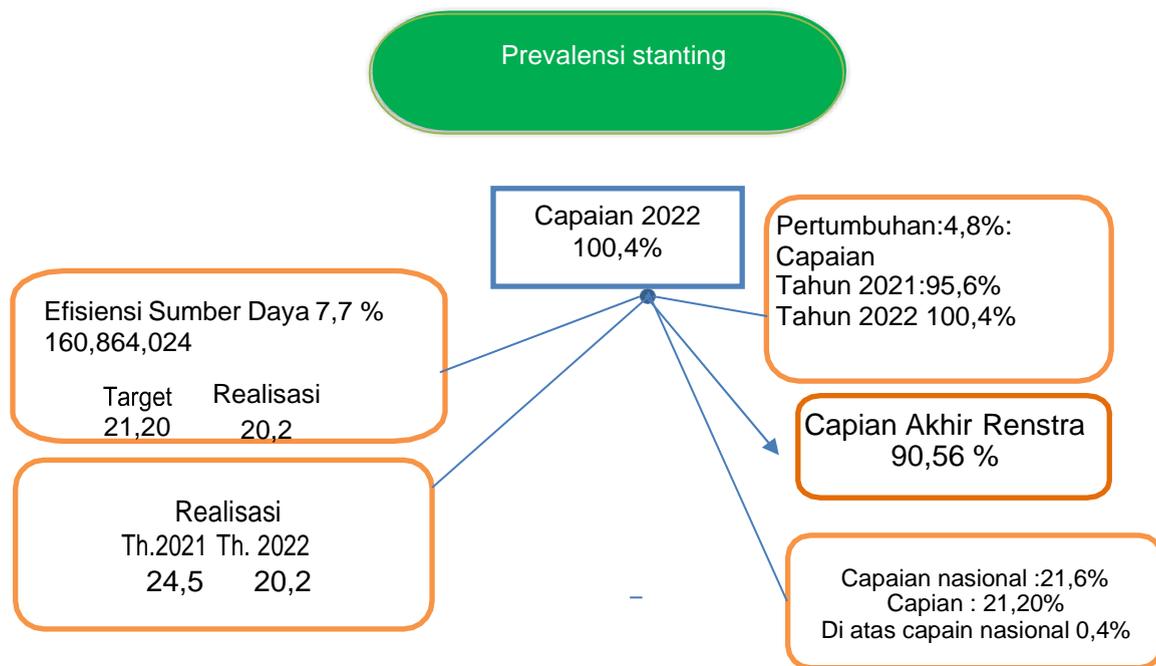
## Sasaran 2

### Menurunnya kasus stunting di Jawa Barat melalui upaya konvergensi lintas sektor

Sasaran ini diukur oleh Indikator Kinerja: Prevalensi Stunting

Tabel. 3.6

<b>N O</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>REALISASI</b>	<b>TARGET</b>	<b>CAPAIAN %</b>	<b>KATEGORI</b>
4	Menurunnya kasus stunting di Jawa Barat melalui upaya konvergensi lintas Sektor	Prevalensi Stunting	20,2%	21,20%	100,4	Baik



Stunting adalah suatu kondisi dimana anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya sebagai akibat dari masalah gizi kronis yaitu kekurangan asupan gizi dalam waktu yang lama.

Capaian indikator prevalensi stunting pada tahun 2022 sebesar 100,4% Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 95,6 % ada kenaikan sebesar 4,8 %, sedangkan realisasi indikator prevalensi stunting tahun 2022 adalah 20,2% dan realisasi 2021 sebesar 24,5% ad penurunan sebesar 4,3 % dengan penurunan stunting ini maka semakin baik, . Jika dibandingkan dengan target akhir renstra di tahun 2023 sebesar 90,56% masih terdapat selisih sebesar 9,44% yang masih harus dicapai dalam kurun waktu 1 tahun di tahun 2023. Perbandingan dengan capaian nasional sebesar 21,6%, masih di atas capaian nasional sebesar 0,4 %. Bila dilihat dalam ranking penurunan stunting Jawa Barat pada urutan 13

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan target prevalensi stunting di Jawa Barat tahun 2022, antara lain :

1. Masih adanya beberapa indikator intervensi spesifik yang mencapai target minimal yang harus dicapai, diantaranya :
  - a. 90% ibu hamil kurang energy kronik (KEK) mendapat tambahan asupan gizi, capaian Jawa Barat tercapai

- b. 80% ibu hamil mengkonsumsi tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan, capaian Jawa Barat sudah tercapai
  - c. 58% remaja putri mendapat TTD (Tablet Penambah Darah), capaian Jawa Barat mencapai 100%
  - d. Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif, capaian Jawa Barat sebesar 68,8%
  - e. Anak usia 6-23 bulan mendapat MP-ASI
  - f. Balita gizi buruk mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk, Jawa Barat sudah tercapai
  - g. 90% balita dipantau pertumbuhan dan perkembangannya, capaian Jawa Barat sudah tercapai, 3 komponen yang diukur yaitu cakupan balita yang ditimbang, cakupan balita yang memiliki KMS, dan cakupan balita yang naik berat badannya
  - h. 90% balita gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi, cakupan Jawa Barat sebesar 90%
  - i. 90% balita memperoleh imunisasi dasar lengkap, cakupan Jawa Barat di angka 90%
2. Dari 11 indikator Intervensi Sensitif, walaupun ada 4 indikator yang terkait dengan urusan bidang Kesehatan, tetapi dukungan program/kegiatan yang berkaitan langsung dengan infrastruktur dan sarana/prasarana lainnya perlu mendapatkan dukungan program/kegiatan lintas sector terkait.
- a. 90% rumah tangga mendapat akses sanitasi (air limbah domestic) layak di Kabupaten/Kota prioritas, capaian Jawa Barat sebesar 90%
  - b. 90% Desa/Kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), 65,82%
  - c. 70% pelayanan KB pasca persalinan
  - d. 15.5% kehamilan yang tidak diinginkan
  - e. 90% cakupan calon pasangan usia subur (PUS) memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian pelayanan nikah
  - f. 90% keluarga berisiko stunting memperoleh pendampingan
  - g. 10 juta keluarga miskin dan rentang memperoleh bantuan tunai bersyarat
  - h. 70% target sasaran memiliki pemahaman yang baik tentang stunting dilokasi prioritas

- i. 15,6 juta keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan.

Upaya Dinas Kesehatan dalam memenuhi target prevalensi stunting dengan memperkuat intervensi spesifik, diantaranya:

- a. Perbaiki asupan gizi ibu kurang energi kronik (KEK) karena kurangnya pengetahuan ibu mengenai Kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan serta melahirkan;
- b. Perbaiki asupan gizi remaja putri sebagai calon ibu yang melahirkan seorang bayi agar tidak terjadi gizi buruk pada masa kehamilan dan melahirkan, salah satunya dengan pemberian tablet tambah darah (TTD);
- c. Peningkatkan pengetahuan ibu dan keluarga untuk memberikan ASI eksklusif;
- d. Peningkatan pelayanan Kesehatan pada ibu selama kehamilan;
- e. Penguatan pelayanan tata laksana gizi buruk;
- f. Peningkatan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita melalui optimalisasi posyandu dan peran kader;
- g. Pelaksanaan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan;

Selain pelaksanaan intervensi spesifik, Dinas Kesehatan pun mendorong penguatan pelaksanaan intervensi sensitif dan terus berkoordinasi bersama dinas terkait agar dapat membantu memenuhi beberapa hal di bawah ini:

- a. Peningkatan akses air minum layak karena 1 dan 3 rumah tangga belum memiliki akses terhadap air bersih;
- b. Peningkatan akses sanitasi yang layak karena 1 dari 5 rumah tangga masih buang air di ruang terbuka;
- c. Menjamin kesediaan akses pangan terutama makanan bergizi bagi masyarakat.

Dari Hasil pencapaian di atas maka dapat terlihat upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk prevalensi stunting dapat dikatakan sudah berjalan efektif sehingga persentase capaian indikator dapat mencapai 100,4% dengan efisiensi sumber daya sebesar Rp. 160,864,024,- atau 7.7%. untuk capaian nasional Jawa Barat Rangkaing 13.

Secara umum capaian target kinerja IKU Dinas Kesehatan terangkum di dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja 2021		Kinerja 2022		Ket.
			Target	Capaian	Target	Capaian	
Meningkatnya Akses dan kualitas Pelayanan Kesehatan yang berdaya saing	Persentase Pelaksanaan SPM di Kab/Kota	Persen	67.63	74.66	70.58	85,34	Indikator Baru
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPTD Provinsi	Poin	81.26-81.75	81.99	81,76-82,25	88	Indikator Baru
	Persentase Rumah sakit Provinsi yang terakreditasi paripurna	RS	50	100	50	150	Indikator Baru
Menurunnya Kasus Stunting di Jawa Barat	Prevalensi Stunting	Persen	23.2	24.5	21.20%	20,2	

Keterangan : (-) Indikator belum digunakan

### 3.3. Capaian keuangan

Tabel 3.7

<b>Sasaran</b>	<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>%</b>
Menurunnya Kasus stunting di Jawa Barat	2,017,352,490	1,856,483,466	92,3
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang berdaya saing	1,995,667,820,029	1,862,297,463,045	94,1
	1,997,685,172,519	1,864,153,946,511	93,3

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran dari sasaran menurunnya kasus stunting di Jawa Barat adalah sebesar Rp.160,864,024 ,- atau 92,3% dari alokasi anggaran tahun 2022. Sedangkan untuk sasaran meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang berdaya saing, realisasi sebesar Rp 1,862,297,463,045.- atau 94,1 % dari alokasi anggaran sehingga ada efisiensi sebesar Rp. 133,370,356,984,- Beberapa factor sehingga terjadinya efisiensi, diantaranya:

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber

Tabel 3,8  
 Capaian Keuangan Berdasarkan Program dalam menunjang capaian IKU

IKU	PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)
SPM	1. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1,058,522,016	977,111,652	92.31
	2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	470,347,933,659	464,048,212,911	98.66
	3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	18,800,000,000	14,473,457,540	76.99
	4. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	396,964,206,409	383,845,113,324	96.70
	5. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	127,320,681	118,726,430	93.25
			<b>887,297,982,765</b>	<b>863,462,621,857</b>
IKM	1. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	50,000,000	43,179,500	86.36
	2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	248,671,736,954	223,982,902,409	90.07
	3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	146,462,410,114	128,183,674,771	87.52
	4. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	712,985,690,196	646,431,736,508	90.67
			<b>1,108,169,837,264</b>	<b>998,641,493,188</b>
AKREDITASI	1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	200,000,000	193,348,000	96.67
		<b>200,000,000</b>	<b>193,348,000</b>	<b>96.67</b>
STUNTING	1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	958,830,474	879,371,814	91.71
	2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1,058,522,016	977,111,652	92.31
		<b>2,017,352,490</b>	<b>1,856,483,466</b>	<b>92.03</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1,997,685,172,519</b>	<b>1,864,153,946,511</b>	<b>93.32</b>

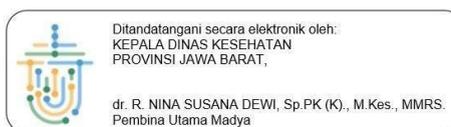
## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 merupakan salah satu bentuk media pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat. Di dalamnya potret pencapaian kinerja sasaran pembangunan daerah berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022. Dokumen perencanaan tersebut berpedoman pada Rencana Strategis Tahun 2018-2023. Secara umum dapat disampaikan bahwa pencapaian digambarkan melalui pencapaian 4 indikator kinerja sasaran dengan capaian 4 indikator rata-rata 100,4%

Realisasi kinerja Dinas Kesehatan telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2022 dengan efisiensi anggaran sebesar 9,7%. Secara umum, kinerja Dinas Kesehatan telah melampaui target yang ditetapkan. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dan harus ditingkatkan di tahun mendatang. Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut :

1. Penguatan koordinasi baik secara internal maupun eksternal;
2. Memperbaiki proses perencanaan dan penganggaran agar dapat secara efektif dan efisien mencapai target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan;
3. Mengarahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan kinerja yang diharapkan;
4. Penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja.

### **KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT**



LAMPIRAN 1.  
IKU DINAS KESEHATAN

IKU DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Target		Keterangan
			2021	2022	2023	
1	2	3	4	6	7	8
1	Presentase pelayanan SPM di kabupaten/ kota	Persen	67.63	70.04	70.58	IKU Dinas Kesehatan
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pada UPT	Poin	81,26-81,75	81,26-81,75	81,76-82,25	IKU Dinas Kesehatan
3	Persentase RS Provinsi yang terakreditasi paripurna	RS Terakreditasi	50	50	67	IKU Dinas Kesehatan
4	Prevalensi Stunting	Persen	23.20%	21.20%	19.20%	IKU Dinas Kesehatan

LAMPIRAN 1.



## **PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022 KEPALA DINAS KESEHATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **dr. R. NINA SUSANA DEWI, Sp.PK.(K)., M,Kes., MMRS**  
Jabatan : **KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT**

selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : **MOCHAMAD RIDWAN KAMIL**  
Jabatan : **GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT**

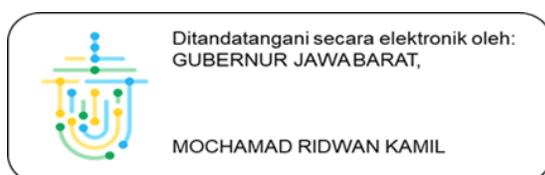
selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

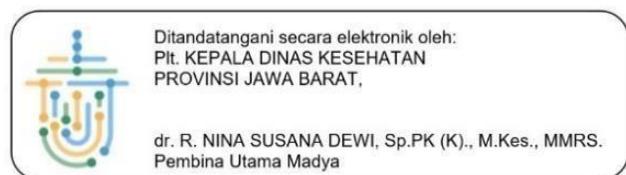
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 29 November 2022

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/83DE2A45EF>

83DE2A45EF

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2022 DINAS KESEHATAN  
PROVINSI JAWA BARAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang berdaya saing	Presentase Pelayanan SPM Kabupaten/Kota	68,92
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan UPTD	81,76- 82,25
		persentase RS Provinsi yangterakreditasi paripurna	3
2	Menurunnya kasus stunting di Jawa Barat melalui upaya konvergensi lintas sektor	Prevalensi stunting	21,2%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 720,380,765,233	APBD
2.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 165,262,410,114	APBD
3.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 2,167,044,032	APBD
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp. 127,320,681	APBD
5.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 1,109,747,632,459	APBD
6.	Dukungan Manajemen (020037)	Rp. 6,410,619,000	APBN
7.	Kesehatan Masyarakat (029015)	Rp. 46,015,335,000	APBN
8.	Pelayanan Kesehatan dan JKN (029016)	Rp. 1,108,207,000	APBN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

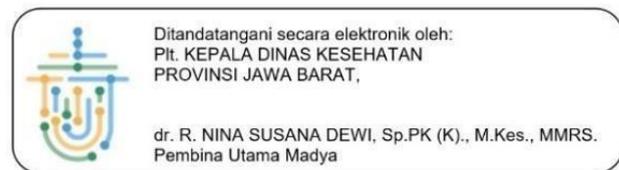
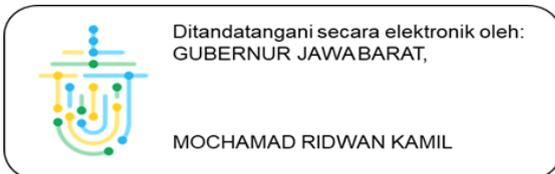
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/83DE2A45EF>

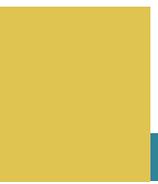
No.	Program	Anggaran	Keterangan
9.	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (029017)	Rp. 18,378,084,000	APBN
10.	Pelayanan Kesehatan dan JKN (029018)	Rp. 162,569,000	APBN
11.	Pelayanan Kesehatan dan JKN (029019)	Rp. 2,456,828,000	APBN

Bandung, 29 November 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI JAWA BARAT,





## LAMPIRAN 4

### DATA CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN

DATA CAPAIAN KINERJA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022																						
No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Konsep	P1			P2					P3		P4				P6				P7	
			Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian 2022	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Tahun 2021	Peningkatan/ Penurunan Capaian 2022	Peningkatan/ Penurunan Realisasi 2021	Target Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi 2022 terhadap Target RPJMD Tahun 2023	Rata-Rata Nasional	Perbandingan Realisasi 2022 dengan Rata-Rata Nasional	Peringkat Jawa Barat di Level Pulau Jawa	Peringkat Jawa Barat di Level Nasional	Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih Anggaran	Capaian	Efisiensi
					%			%			Sumber: RPJMD	%								%	%	
1	2	3	4	5	600,00%	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	1	2	3	4	5	6
MISI 2	MELAHIRKAN MANUSIA YANG BERBUDAYA, BERKUALITAS, BAHAGIA, DAN PRODUKTIF MELALUI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK YANG INOVATIF																					
SASARAN 1	MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG BERDAYA SAING																					
1	Persentase Pelayanan SPM di Kabupaten/kota	merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara.	68,92	85,34	121%	67,63	74,6	110%	100,4%		70,58	100%	69,56	15,78			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1,058,522,016	977,111,652	81,410,364	92.31	
																	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	470,347,933,659	464,048,212,911	6,299,720,748	98.66	
																	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	18,800,000,000	14,473,457,540	4,326,542,460	76.99	
																	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	396,964,206,409	383,845,113,324	13,119,093,085	96.7	
																	PROGRAM SEDIAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	127,320,681	118,726,430	8,594,251	93.25	
																	Effisiensi IKU 1	887,297,982,765	863,462,621,857	23,835,360,908	97.31	2,7
2	persentase RS Provinsi Yang Terakreditasi Paripurna	Indikator RS Provinsi yang terakreditasi Paripurna dilihat dari penilaian Tim KARS Nasional dimana capaian indikator RS Provinsi terakreditasi paripurna sebesar 100% dari target	50	75	150%	50	50	100%	50%		67	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	50,000,000	43,179,500	6,820,500	86.36	
																	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	248,671,736,954	223,982,902,409	24,688,834,545	90.07	

